PENGENDALIAN INFLASI PANGAN PERKOTAAN DALAM MENDUKUNG KETAHANAN PANGAN DAERAH (STUDI KASUS KOTA BANDA ACEH)

Quratun Aini Muharrani
NPP. 33.0037
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah
Email:

Pembimbing Skripsi: Selvi Diana Meilinda, S.AN, MPA
Email: selvi@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap): *Urban food inflation poses a serious threat to regional food security, particularly for cities highly dependent on external supplies like Banda Aceh. In 2025, Banda Aceh's inflation peaked at 6.10 percent, severely hitting the urban poor's purchasing power. Previous studies focused heavily on macroeconomic indicators or general supply chains, leaving a critical research gap on how local institutional dynamics, supply dependence, and municipal budget bottlenecks directly impact urban food security metrics.* ***Purpose:*** *This study aims to analyze urban food inflation and its impact on community food security, examine local government control efforts, and identify constraining factors in Banda Aceh City.* ***Method:*** *This study uses a descriptive qualitative approach with a case study method. Data was gathered through in-depth interviews with 7 key informants, field observations, and document analysis, then analyzed using the Miles and Huberman interactive model.* ***Result:*** *Food inflation in Banda Aceh is highly vulnerable due to extreme external supply dependence, long distribution chains, and inadequate infrastructure. Local interventions such as market operations, backyard farming (KWT), and inter-regional cooperation (MoU) are not yet optimized. Policy implementation is hindered by institutional fragmentation, structural coordination gaps, departmental "silo thinking," and digital supply reporting lags. Furthermore, budgetary constraints and the lack of autonomous financial authority for the TPID prevent rapid tactical responses during price spikes.* ***Conclusion:*** *While a response framework exists, its structural effectiveness is highly constrained by regulatory delays, inter-agency silos, and supply chain vulnerabilities. It is strongly recommended to accelerate Government Food Reserve (CPP) regulations, expand synchronized regional cooperation, deploy a real-time early warning system, and grant independent budgetary authority to the TPID.*

Keywords: *Banda Aceh City; Food Inflation; Food Security Framework; Regional Inflation Control Team (TPID).*

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian): Inflasi pangan perkotaan menjadi ancaman serius bagi ketahanan pangan daerah, terutama bagi kota yang sangat bergantung pada pasokan eksternal seperti Banda Aceh. Pada tahun 2025, inflasi di Banda Aceh memuncak hingga 6,10 persen, yang sangat memukul daya beli masyarakat miskin perkotaan. Penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada indikator makroekonomi atau rantai pasok pertanian secara umum, sehingga menyisakan kesenjangan penelitian kritis mengenai bagaimana dinamika kelembagaan lokal, ketergantungan pasokan, dan hambatan anggaran daerah berdampak langsung pada metrik ketahanan pangan perkotaan di tingkat kotamadya. **Tujuan:** Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi inflasi pangan perkotaan dan dampaknya terhadap ketahanan pangan masyarakat, mengkaji upaya pengendalian inflasi oleh pemerintah daerah, serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat di Kota Banda Aceh. **Metode:** Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan 7 informan kunci dari lembaga terkait dan masyarakat, observasi lapangan, serta analisis dokumen, yang kemudian dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. **Hasil/Temuan:** Inflasi pangan di Banda Aceh sangat rentan akibat ketergantungan ekstrem pada pasokan luar daerah, rantai distribusi yang panjang, dan infrastruktur pendukung yang belum memadai. Intervensi lokal seperti operasi pasar, optimalisasi pekarangan (KWT), dan kerja sama antar-daerah (MoU) belum berjalan optimal. Implementasi kebijakan terhambat oleh fragmentasi kelembagaan, kesenjangan koordinasi struktural, ego sektoral (*silo thinking*) antar-dinas, serta jeda waktu (*lag*) pelaporan pasokan digital. Selain itu, keterbatasan anggaran dan ketiadaan otoritas finansial mandiri bagi TPID menghambat respon taktis yang cepat saat terjadi lonjakan harga. **Kesimpulan:** Meskipun kerangka respons telah dibentuk, efektivitas strukturalnya sangat terhambat oleh keterlambatan regulasi, ego sektoral antar-lembaga, dan kerentanan rantai pasok. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk mempercepat regulasi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP), memperluas kerja sama regional yang sinkron, menerapkan sistem peringatan dini *real-time*, dan memberikan otoritas anggaran mandiri kepada TPID.

Kata kunci: Kota Banda Aceh; Inflasi Pangan; Ketahanan Pangan Perkotaan; Tim Pengendali Inflasi Daerah.

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Inflasi pangan di wilayah perkotaan merupakan salah satu tantangan paling krusial dalam pembangunan ekonomi dan sosial, karena berdampak langsung pada stabilitas ekonomi makro dan pemenuhan hak-hak dasar masyarakat. Karakteristik wilayah perkotaan yang didominasi oleh sektor jasa dan perdagangan secara struktural membentuk ketergantungan yang tinggi terhadap pasokan bahan pangan dari luar wilayah administrasi kota. Bagi kota-kota yang tidak memiliki basis produksi pertanian yang luas (*net-konsumen*), ketergantungan pada pasokan komoditas pangan dari luar daerah menjadi titik lemah utama yang memicu kerentanan gejolak harga (*price volatility*). Gejolak harga ini rentan terjadi apabila terdapat disrupsi pada jalur logistik, perubahan iklim, maupun gangguan produksi di daerah sentra asal komoditas (Ru et al., 2024).

Kota Banda Aceh, sebagai ibu kota Provinsi Aceh, mencerminkan karakteristik kota konsumen dengan tingkat ketergantungan pasokan eksternal yang sangat tinggi mencapai lebih dari 85 persen untuk komoditas hortikultura dan bahan pangan pokok lainnya. Sepanjang tahun 2025, Kota Banda Aceh dihadapkan pada fluktuasi inflasi pangan yang ekstrem, dengan puncaknya menyentuh angka 6,10 persen secara *year-on-year* pada Desember 2025. Angka ini melampaui koridor sasaran inflasi nasional dan menjadi salah satu yang tertinggi di wilayah regional. Lonjakan harga pada komoditas

pangan pokok strategis seperti cabai merah, bawang merah, beras premium, dan daging ayam ras berimplikasi langsung pada penurunan daya beli riil masyarakat, khususnya bagi kelompok miskin perkotaan yang mengalokasikan sebagian besar struktur pendapatannya hanya untuk konsumsi makanan domestik harian.

Dalam kerangka *Food Security Framework*, ketahanan pangan tidak hanya diukur dari aspek ketersediaan fisik (*availability*) secara makro di gudang-gudang logistik. Ketahanan pangan yang hakiki juga mencakup keterjangkauan aksesibilitas (*accessibility*) baik secara fisik maupun ekonomi, pemanfaatan gizi (*utilization*) yang aman dan seimbang, serta stabilitas pasokan sepanjang waktu (*stability*) (Abay et al., 2023). Fluktuasi inflasi yang tidak terkendali secara nyata merusak sendi-sendi stabilitas dan akses pangan tersebut. Ketika harga di pasar-pasar tradisional seperti Pasar Peunayong melonjak tidak rasional, rumah tangga miskin terpaksa mengadopsi mekanisme bertahan hidup (*coping mechanism*) yang merugikan gizi, seperti mengurangi keragaman konsumsi protein, mengalihkan belanja ke bahan pangan olahan murah, bahkan memangkas frekuensi makanan harian anak-anak mereka (Chiera et al., 2025).

Oleh karena itu, efektivitas kebijakan pengendalian inflasi yang dijalankan oleh Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Banda Aceh menjadi prasyarat mutlak dalam menjaga ketahanan pangan daerah. Sinergi lintas sektoral antara instansi perdagangan, pertanian, kelembagaan pangan, dan sektor logistik di bawah payung TPID dituntut untuk mampu memitigasi risiko lonjakan harga secara cepat. Namun, dalam realitas empirisnya, penanganan inflasi sering kali terbentur oleh ego sektoral (*silo thinking*), keterlambatan regulasi teknis cadangan pangan, serta inefisiensi rantai distribusi lokal yang memicu disparitas harga antara pusat kota dan wilayah pinggiran. Berangkat dari kompleksitas permasalahan tersebut, penelitian ini mendesak untuk dilakukan guna mengkaji secara komprehensif dinamika pengendalian inflasi pangan perkotaan dalam mendukung ketahanan pangan daerah di Kota Banda Aceh.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (*Research Gap*)

Ada beberapa permasalahan mendasar yang melatarbelakangi penelitian mengenai pengendalian inflasi pangan perkotaan di Kota Banda Aceh ini. Pertama, kerentanan struktural Kota Banda Aceh yang ditandai dengan ketergantungan pasokan pangan dari luar daerah yang sangat ekstrem. Berdasarkan data BPS Kota Banda Aceh (2024), luas lahan pertanian produktif di kota ini hanya sekitar 42,21 hektar atau 0,02 persen dari total luas wilayah, dengan lahan sawah produktif hanya 13 hektar. Kondisi ini memaksa Kota Banda Aceh untuk memenuhi sekitar 90 persen kebutuhan pangannya dari daerah lain seperti Kabupaten Aceh Besar, Pidie, Aceh Utara, hingga Sumatera Utara (Ansori, 2024). Ketergantungan eksternal yang ekstrem ini menempatkan Banda Aceh dalam posisi yang sangat rentan terhadap *price volatility* dan guncangan eksternal, sebagaimana dijelaskan dalam kerangka ketahanan pangan FAO (2008) bahwa dimensi stabilitas (*stability*) menjadi pilar yang paling terancam ketika suatu wilayah tidak memiliki kendali atas produksi pangannya sendiri. Setiap gangguan pada rantai pasok, mulai dari gagal panen di daerah produsen, kenaikan harga BBM yang mempengaruhi biaya transportasi, hingga hambatan distribusi akibat bencana alam, akan langsung berdampak pada harga di tingkat konsumen.

Kedua, rendahnya efektivitas kebijakan pengendalian inflasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Meskipun TPID telah dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2022 dan menjalankan berbagai program seperti operasi pasar murah, pemantauan harga harian, kerjasama antar daerah, serta program *urban farming*, realitas di lapangan menunjukkan bahwa penanganan inflasi pangan masih carut marut. Data BPS Kota Banda Aceh (2025) menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2025 terjadi fluktuasi inflasi ekstrem dengan puncak mencapai 6,10 persen pada Desember 2025, yang berdampak

signifikan pada daya beli masyarakat, khususnya kelompok miskin perkotaan. Inflasi pangan bersifat *pro-poor* atau lebih berdampak pada masyarakat miskin karena proporsi pengeluaran untuk pangan pada rumah tangga miskin mencapai 60-70 persen (Headey & Hirvonen, 2022), jauh lebih besar dibandingkan rumah tangga kaya yang hanya 20-30 persen.

Ketiga, adanya kesenjangan antara ketersediaan sumber daya dan implementasi kebijakan, terutama dalam dua aspek kunci yaitu distribusi dan penganggaran (Nurma Khusnul, 2025). Dari sisi distribusi, rantai pasok pangan masih panjang dan tidak efisien, melibatkan 5-6 perantara dari petani ke konsumen dengan *mark-up* harga mencapai 30-40 persen, sementara praktik spekulasi oleh tengkulak marak terjadi pada komoditas tahan simpan. Infrastruktur jalan yang rusak di beberapa titik menuju pasar induk dan keterbatasan fasilitas *cold storage* semakin memperparah kondisi ini. Dari sisi penganggaran, meskipun Pemerintah Kota Banda Aceh mengalokasikan anggaran yang tidak kecil untuk program ketahanan pangan dan pengendalian inflasi, efektivitas anggaran tersebut patut dipertanyakan. Berdasarkan Laporan Kinerja Dinas Pangan Aceh (2024), sejumlah program tertunda karena regulasi teknis yang belum rampung, seperti Peraturan Gubernur tentang Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) yang belum selesai sehingga cadangan pangan tidak dapat didistribusikan sepanjang tahun 2024. Hal ini menunjukkan adanya *disconnect* antara ketersediaan stok pangan di tingkat provinsi dengan mekanisme penyaluran yang efektif hingga ke tingkat kota.

Keempat, fragmentasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi antar instansi terkait. Penelitian Sufi et al. (2025) mengungkapkan bahwa tata kelola ketahanan pangan perkotaan di Indonesia masih menghadapi tiga tantangan utama, yaitu fragmentasi kelembagaan (*institutional fragmentation*) di berbagai instansi dengan mandat yang tumpang tindih, mekanisme koordinasi yang terbatas yang mengakibatkan kesenjangan implementasi kebijakan, serta ketidakseimbangan kekuasaan (*power asymmetry*) di antara para pemangku kepentingan. Ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masih sering terjadi, di mana masing-masing instansi berjalan sendiri-sendiri (*silo thinking*) tanpa sinergi yang terukur, sementara keterbatasan kewenangan TPID yang hanya bersifat koordinatif, tanpa kewenangan anggaran yang memadai, membuat banyak rekomendasi kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara cepat dan tepat (Sunarto et al., 2024).

Kesenjangan penelitian (*research gap*) yang mendasari studi ini terletak pada masih terbatasnya kajian empiris yang secara komprehensif menganalisis pengendalian inflasi pangan perkotaan dengan menggunakan pendekatan *Food Security Framework* FAO di wilayah yang memiliki kerentanan struktural tinggi seperti Kota Banda Aceh. Sebagian besar penelitian terdahulu masih bersifat makro dan nasional (Simatupang, 2018; Suryana, 2018; Mewa et al., 2021), atau berfokus pada aspek kebijakan tanpa melihat secara mendalam implementasi di lapangan dan kendala-kendala operasional yang dihadapi. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan melakukan analisis mendalam terhadap kondisi inflasi pangan, upaya pemerintah daerah, dan faktor-faktor kendala dalam pengendalian inflasi pangan di Kota Banda Aceh, dengan harapan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan pengendalian inflasi pangan yang lebih efektif dalam mendukung ketahanan pangan daerah, sekaligus memperkaya kajian kebijakan publik di bidang ketahanan pangan perkotaan.

1.3. Urgensi Penelitian

Penelitian ini memiliki urgensi yang sangat krusial baik dari aspek keilmuan kebijakan publik maupun tata kelola pemerintahan daerah secara praktis. Secara keilmuan, penelitian ini penting dilakukan saat ini untuk memberikan analisis empiris mengenai interaksi antara dinamika inflasi perkotaan dengan sistem ketahanan pangan lokal melalui pendekatan *Food Security Framework*. Jika penelitian ini tidak dilakukan, maka formulasikebijakan pengendalian harga di tingkat daerah akan terus kehilangan basis data yang objektif dan terjebak dalam pola penanganan yang bersifat reaktif belaka.

Dampak fatal apabila penelitian dan evaluasi ini diabaikan adalah potensi terjadinya stagnasi ekonomi lokal dan peningkatan angka kerawanan pangan perkotaan. Pemerintah daerah akan terus kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memetakan hambatan birokrasi, ego sektoral OPD, dan hambatan regulasi CPP. Akibatnya, alokasi anggaran yang besar untuk ketahanan pangan akan terus berjalan tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan inefisien, sementara masyarakat miskin perkotaan akan semakin terbebani oleh ketidakpastian harga bahan pangan pokok.

1.4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi dan dibangun berdasarkan pijakan teoritis serta empiris dari beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji kebijakan ketahanan pangan, literasi informasi, dan pemberdayaan masyarakat kelembagaan. Bagian ini menguraikan berbagai studi terdahulu yang memiliki relevansi tinggi dengan fokus penelitian mengenai pengendalian inflasi pangan perkotaan dalam mendukung ketahanan pangan daerah. Referensi terhadap temuan-temuan akademik sebelumnya berfungsi sebagai landasan komparatif yang memungkinkan peneliti untuk memahami konteks, metodologi, serta capaian-capaian ilmiah yang telah ada sebelumnya.

Berdasarkan telaah pustaka yang dilakukan, terlihat adanya konvergensi serta diferensiasi substansial dari hasil pemikiran para peneliti terdahulu. Pantjar Simatupang melalui metode kualitatif analisis kritis mengusulkan peralihan paradigma kebijakan dari sekadar swasembada menuju pendekatan hak atas pangan (*food entitlement*) (Simatupang, 2018). Ia menekankan bahwa kebijakan pangan nasional selama ini terlalu berorientasi pada aspek ketersediaan fisik, sehingga mengabaikan dimensi aksesibilitas ekonomi dan stabilitas harga yang justru menjadi faktor penentu kesejahteraan masyarakat di tingkat akar rumput. Sejalan dengan pemikiran tersebut, Achmad Suryana lewat metode tinjauan pustaka menyoroti tantangan besar berupa fluktuasi kualitas konsumsi gizi masyarakat yang masih berada di bawah rekomendasi para ahli, di tengah kemampuan pemenuhan kuantitas pangan nasional yang cukup. Suryana menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah serta strategi adaptif yang mempertimbangkan perubahan iklim dan dinamika pasar untuk mengatasi lemahnya koordinasi antarlembaga (Suryana, 2025).

Di sisi lain, kajian konseptual dan analisis kebijakan kualitatif yang dilakukan oleh Jennifer Clapp dkk. menawarkan terobosan penting melalui adopsi kerangka kerja ketahanan pangan enam dimensi (*six-dimensional Food Security Framework*). Clapp menambahkan dua pilar krusial, yaitu agensi (*agency*) dan keberlanjutan (*sustainability*), guna melengkapi empat pilar klasik yang telah mapan (ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas). Pilar agensi menekankan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan kapasitas institusi lokal dalam mengendalikan sistem pangan mereka secara mandiri, sementara pilar keberlanjutan memastikan sistem tersebut mampu bertahan terhadap guncangan ekologis dan ekonomi jangka panjang. Pandangan ini memperluas cakupan analisis yang sangat relevan bagi konteks tata kelola pemerintahan daerah, karena menempatkan aspek partisipasi kelembagaan sebagai komponen inti pencapaian ketahanan pangan (Clapp et al., 2022).

Selanjutnya, studi oleh (Suryana, 2014) menggunakan analisis Data Komposisi Pangan Indonesia (TKPI) membuktikan bahwa kekuatan ketahanan pangan nasional bertumpu pada efisiensi jalur distribusi dan kolaborasi multisektor yang kuat dalam merespon dinamika global. Kinerja ini dievaluasi secara komparatif oleh (Tono et al., 2023). melalui metode deskriptif kualitatif menggunakan indikator *Global Food Security Index* (GFSI) dan *Food Security Vulnerability Atlas* (FSVA). Meskipun capaian agregat nasional dinilai baik, Mewa mengidentifikasi adanya ketimpangan antarwilayah yang menyisakan puluhan kabupaten/kota dalam status rentan pangan, sehingga memerlukan intervensi berupa penguatan infrastruktur dasar dan pemberdayaan pendapatan lokal. Menutup jalinan teori tersebut, Andi Rachman Salasa dengan metode kualitatif deskriptif analitis menegaskan bahwa status Indonesia sebagai negara agraris tidak otomatis menjamin keterjangkauan

pangan akibat tingginya ketergantungan pada pasokan impor. Salasa mengusulkan pergeseran radikal dari strategi swasembada semata menuju integrasi dimensi ketersediaan, akses, dan keterjangkauan yang seimbang guna mewujudkan stabilitas harga dan pemerataan ekonomi yang berkelanjutan (Salasa, 2021b).

Secara komprehensif, seluruh referensi utama ini mengerucut pada satu kesimpulan bahwa ketahanan pangan merupakan tantangan multi-dimensi yang kompleks. Para peneliti terdahulu sepakat bahwa penanganan pangan tidak dapat dilakukan secara sektoral atau parsial, melainkan harus dikelola melalui pendekatan tata kelola daerah yang terintegrasi, responsif terhadap inflasi, serta adaptif terhadap perubahan lokal. Sintesis dari berbagai metodologi dan temuan terdahulu inilah yang mendasari peneliti untuk menganalisis efektivitas kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dalam menjaga stabilitas pangan perkotaan.

1.5. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, di mana konteks penelitian yang dilakukan yakni pengendalian inflasi pangan perkotaan dalam mendukung ketahanan pangan daerah dengan studi kasus Kota Banda Aceh, yang secara spesifik menyoroti problematika distribusi dan penganggaran sebagai akar permasalahan. Penelitian ini memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan lima penelitian sebelumnya, baik dari segi teori, metode, kebijakan, maupun karakteristik objek penelitian.

Pertama, berbeda dengan penelitian Pantjar Simatupang yang melakukan analisis kritis terhadap paradigma kebijakan ketahanan pangan nasional dengan pendekatan kualitatif analisis kebijakan, penelitian ini tidak hanya mengkritik paradigma secara makro, tetapi secara spesifik mengevaluasi implementasi kebijakan di tingkat lokal melalui pendekatan studi kasus. Penelitian ini juga menggunakan *Food Security Framework* dari FAO sebagai pisau analisis utama, sementara Simatupang lebih berfokus pada kritik terhadap orientasi swasembada beras yang mengabaikan dimensi akses dan stabilitas.

Kedua, penelitian Achmad Suryana yang berjudul "*Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025*" menggunakan metode tinjauan pustaka (*literature review*) dan lebih bersifat makro-prospektif dengan cakupan nasional. Sementara itu, penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan studi kasus yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika lokal, termasuk faktor-faktor seperti ketergantungan pasokan eksternal 90 persen, rantai distribusi panjang, dan infrastruktur yang tidak memadai.

Ketiga, penelitian Jennifer Clapp dkk menawarkan kerangka konseptual enam dimensi ketahanan pangan (menambahkan *agency* dan *sustainability*) melalui pendekatan analisis kebijakan kualitatif dan tinjauan konseptual. Penelitian ini berbeda karena tidak sekadar mengusulkan kerangka teoritis, tetapi mengujinya secara empiris di lapangan dengan mengukur keempat pilar klasik FAO (ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas) menggunakan indikator-indikator terukur seperti luas lahan produktif, margin perdagangan, skor PPH, dan koefisien variasi harga. Penelitian ini juga menambahkan dimensi kelembagaan dengan menganalisis peran TPID sebagai aktor kunci pengendali inflasi yang tidak menjadi fokus Clapp.

Keempat, penelitian Hariyono yang membahas ketahanan pangan Indonesia secara umum dengan metode pengembangan dan analisis data komposisi pangan serta Mewa dkk yang mengevaluasi kinerja ketahanan pangan Indonesia menggunakan indikator GFSI dan FSVA, keduanya bersifat nasional-agregat dan tidak menyentuh dinamika perkotaan spesifik. Penelitian ini justru memfokuskan pada kota Banda Aceh sebagai wilayah dengan ketergantungan pasokan eksternal ekstrem, sehingga menghasilkan temuan-temuan seperti *disconnect* antara stok CPP dan distribusi,

kesenjangan harga pusat dan pinggiran 10-15 persen, serta rendahnya efektivitas sistem informasi pangan (E-Haba Pangan) yang tidak ditemukan dalam penelitian Hariyono maupun Mewa.

Kelima, penelitian Andi Rachman Salasa yang membahas paradigma dan dimensi strategi ketahanan pangan Indonesia dengan metode kualitatif deskriptif analitis juga memiliki perbedaan signifikan. Salasa lebih fokus pada usulan pergeseran paradigma dari swasembada ke pendekatan komprehensif di tingkat nasional, sementara penelitian ini secara operasional mengidentifikasi kendala struktural, kelembagaan, dan operasional yang menghambat pengendalian inflasi di tingkat kota, seperti ego sektoral antar OPD, keterlambatan realisasi anggaran, serta lemahnya koordinasi antar daerah dengan Aceh Besar dan Sumatera Utara.

Selain itu, dari sisi metode, penelitian ini menggunakan studi kasus dengan wawancara mendalam, observasi lapangan, dan analisis dokumen yang melibatkan beragam informan (pejabat TPID, pedagang, dan masyarakat), sementara sebagian besar penelitian terdahulu menggunakan analisis kebijakan atau tinjauan pustaka tanpa eksplorasi empiris langsung di lapangan. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda, yakni mengacu pada empat pilar *Food Security Framework* FAO yang dioperasionalisasikan menjadi 12 indikator terukur (seperti luas lahan produktif, margin perdagangan, proporsi pengeluaran pangan, dan koefisien variasi harga), yang belum pernah digunakan secara komprehensif dalam studi-studi sebelumnya pada konteks Kota Banda Aceh.

Dengan demikian, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis integratif yang menghubungkan *Food Security Framework* dengan kinerja kelembagaan TPID, serta identifikasi faktor-faktor kendala spesifik (distribusi dan penganggaran) yang selama ini belum terpetakan secara sistematis dalam literatur ketahanan pangan perkotaan di Indonesia, khususnya di wilayah pascakonflik dan rawan bencana seperti Aceh.

1.6. Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan memperoleh gambaran yang jelas mengenai kondisi inflasi pangan perkotaan serta dampaknya terhadap ketahanan pangan masyarakat di Kota Banda Aceh, yang mencakup aspek ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas pangan berdasarkan *Food Security Framework*.

II. METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan deskriptif kualitatif melalui metode studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam, kontekstual, dan kontemporer mengenai fenomena hambatan birokrasi, inefisiensi distribusi, serta dinamika koordinasi kelembagaan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Banda Aceh yang tidak dapat dimanipulasi atau diukur secara numerik semata. Pengumpulan data primer dilakukan secara langsung di lapangan melalui teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan observasi, sedangkan data sekunder dihimpun melalui analisis berbagai dokumen resmi, seperti Laporan Kinerja Dinas Pangan Aceh, data *time-series* inflasi BPS, dan dokumen kebijakan anggaran daerah. Untuk menjamin kredibilitas informasi yang bersumber langsung dari aktor kunci ekosistem kebijakan pangan perkotaan, pemilihan informan dilakukan secara terarah menggunakan teknik *purposive sampling*. Informan utama (*key informants*) dalam penelitian ini berjumlah 7 orang yang secara representatif mewakili unsur kebijakan, pelaksana teknis, pelaku usaha, dan konsumen terdampak. Kelompok tersebut meliputi Bapak Harisman, S.STP, M.Ec.Dev (Wijatmoko et al., 2025). selaku Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Banda Aceh sekaligus Sekretaris TPID sebagai informan kunci otoritas kebijakan, Ibu Desy Anggraini, SP selaku Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota

Banda Aceh sebagai pelaksana teknis ketersediaan pangan, serta Bapak Nasruddin, S.STP, M.Si. selaku Sekretaris Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Kota Banda Aceh yang membidangi pelaksana teknis stabilitas harga pasar. Selanjutnya, data juga diperkuat oleh penuturan Ibu Vinda Anggya, S.STP selaku staf Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Banda Aceh yang bertindak sebagai tenaga pendukung teknis administrasi TPID, Bapak Syamsul Bahri selaku pedagang sembako di Pasar Peunayong sebagai representasi pelaku usaha atau distributor, serta Ibu Raudhatul dan Cut Sarah selaku warga Kota Banda Aceh yang mewakili elemen konsumen rumah tangga dan masyarakat umum (Marthalina, 2018).

Selanjutnya, teknik pengujian keabsahan data kualitatif dilakukan melalui metode triangulasi sumber untuk memverifikasi kesesuaian data antara pernyataan pejabat TPID, dinas teknis, pedagang pasar, dan konsumen, serta triangulasi teknik untuk membandingkan hasil wawancara dengan observasi fluktuasi harga di Pasar Peunayong dan kesesuaian dokumen Laporan Kinerja Dinas Pangan. Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis secara interaktif mengikuti model Miles dan Huberman melalui tiga tahapan utama yang berjalan secara berkelanjutan. Tahap pertama adalah reduksi data yang berfungsi menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, dan mengabstraksikan data mentah hasil transkrip wawancara di lapangan mengenai isu inflasi dan ketahanan pangan. Tahap kedua adalah penyajian data (*data display*) dengan menyusun matriks informasi naratif serta tabel data pendukung komoditas guna memetakan pola hubungan kelembagaan dan dampak inflasi secara jelas. Tahap akhir adalah penarikan kesimpulan atau verifikasi untuk merumuskan makna dari data yang telah direduksi dan ditampilkan agar dapat menjawab rumusan masalah secara lugas dan valid. Penelitian ini sendiri dilaksanakan di wilayah administrasi Kota Banda Aceh, dengan fokus lokus operasional di Sekretariat Daerah Kota Banda Aceh (Bagian Perekonomian dan SDA) serta Pasar Tradisional Peunayong Kota Banda Aceh. Seluruh rangkaian pengumpulan data lapangan dan penelusuran dokumen ini dilaksanakan secara intensif selama dua bulan penuh, yaitu pada bulan Maret hingga April 2026, guna menangkap dinamika empiris dan kondisi aktual dari pergerakan harga pangan pasca-fluktuasi ekstrem yang terjadi sepanjang tahun 2025 (Prabowo, 2019).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil analisis dokumen data historis dan wawancara mendalam di lapangan, kondisi inflasi pangan di Kota Banda Aceh dikategorikan berada pada tingkat kerentanan yang sangat tinggi. Sebagai wilayah perkotaan yang berstatus net-konsumen yaitu wilayah yang tidak memiliki basis lahan pertanian produktif berskala besar untuk mencukupi kebutuhan domestiknya sendiri, stabilitas harga komoditas pokok di Kota Banda Aceh sangat rapuh terhadap gangguan pasokan dari luar daerah.

Kota Banda Aceh mengandalkan koridor distribusi dari wilayah tetangga seperti Kabupaten Aceh Besar, Pidie, hingga pasokan barang grosir dari Provinsi Sumatera Utara. Ketika jalur distribusi ini mengalami kendala atau wilayah produsen mengalami gagal panen akibat faktor cuaca, maka volatilitas harga di pasar tradisional Kota Banda Aceh akan langsung melonjak secara drastis. Puncak fluktuasi inflasi ekstrem terjadi sepanjang tahun 2025, di mana angka inflasi umum kota menyentuh puncaknya sebesar 6,10 persen secara *year-on-year* (y-on-y) pada bulan Desember 2025. Angka ini jauh berada di atas ambang batas sasaran inflasi nasional, yang kemudian memberikan hantaman keras (*economic shock*) secara langsung pada struktur pengeluaran domestik dan daya beli riil masyarakat ekonomi lemah.

Untuk memetakan sejauh mana gejolak inflasi tersebut memengaruhi sendi-sendi pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, analisis dalam penelitian ini dibedah menggunakan empat dimensi utama

dalam *Food Security Framework* (Kerangka Kerja Ketahanan Pangan), yaitu: Ketersediaan (*Availability*), Aksesibilitas (*Accessibility*), Pemanfaatan (*Utilization*), dan Stabilitas (*Stability*).

3.1. Ketersediaan (Availability)

Dimensi ketersediaan pangan melihat pada kecukupan fisik pasokan pangan pokok yang masuk dan beredar di wilayah Kota Banda Aceh. Dari hasil observasi di Pasar Tradisional Peunayong dan gudang penyimpanan logistik, volume pasokan pangan secara umum dinilai mencukupi kebutuhan dasar warga secara kuantitas makro, namun pasokannya bersifat fluktuatif dan sangat bergantung pada ritme panen di wilayah produsen eksternal. Ketersediaan fisik komoditas lokal seperti sayuran, beras, dan bumbu dapur di pasar-pasar utama sangat dipengaruhi oleh jadwal kedatangan truk logistik yang melintasi perbatasan darat.

Data hasil olahan riset lapangan mengenai penilaian informan terhadap ketersediaan fisik pangan pokok di Kota Banda Aceh selama periode inflasi tinggi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1.

Penilaian Informan terhadap Aspek Ketersediaan Fisik Pangan Pokok

No	Indikator Ketersediaan	Deskripsi Kondisi Lapangan	Penilaian Kualitatif
1	Volume Pasokan Pasar	Pasokan komoditas pokok tersedia di pedagang eceran, namun kuantitasnya menurun drastis saat cuaca buruk di perbatasan.	Cukup, tetapi Rentan
2	Ketergantungan Eksternal	Lebih dari 85% kebutuhan pangan pokok (cabai, bawang, sayur segar) dipasok dari luar wilayah administrasi kota.	Sangat Tinggi
3	Stok Cadangan Pemerintah	Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di gudang BULOG tersedia, namun proses distribusinya menunggu birokrasi izin tertulis.	Tersedia, Terbatas Akses Taktisnya

Sumber: Hasil Pengolahan Data Riset Lapangan dan Dokumen Teknis TPID, 2026

Tingginya angka ketergantungan eksternal ini menandakan bahwa ketahanan pangan Kota Banda Aceh dari sisi ketersediaan berada dalam kondisi yang semu (*pseudo-availability*). Meskipun barang terlihat menumpuk di lapak pedagang Pasar Peunayong, stok tersebut tidak memiliki ketahanan jangka panjang karena kota tidak memiliki *buffer stock* mandiri yang dikelola langsung oleh pemerintah kota untuk mengantisipasi masa krisis distribusi.

3.2. Akses (Accessibility)

Dimensi akses menitikberatkan pada kemampuan rumah tangga atau individu untuk menjangkau pangan secara ekonomi (daya beli) maupun fisik (keterjangkauan lokasi). Ditinjau dari dimensi ini, hantaman inflasi pangan sebesar 6,10 persen tersebut secara nyata mengganggu aspek aksesibilitas ekonomi masyarakat. Ketika laju kenaikan harga barang tidak diimbangi dengan peningkatan pendapatan nominal warga perkotaan, maka secara otomatis terjadi penurunan daya beli riil. Kenaikan harga menempatkan kelompok masyarakat berpendapatan rendah dan pekerja sektor informal pada posisi yang sangat rentan kehilangan akses terhadap pangan yang berkualitas.

Tabel 2.
Perkembangan Indikator Kinerja Dimensi Akses (Accessibility) Pangan di Kota Banda Aceh Tahun 2023–2025

No	Indikator Akses (Accessibility) Pangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Daya Beli Masyarakat (Akses Ekonomi)			
	a. Garis Kemiskinan Kota Banda Aceh (Rp/Kapita/Bulan)	Rp642.350	Rp675.800	Rp718.450
	b. Rata-Rata Proporsi Pengeluaran Pangan Rumah Tangga Desil 1-2 (%)	58,40%	61,15%	66,80%
	c. Upah Minimum Kota (UMK) Banda Aceh (Rp)	Rp3.540.555	Rp3.635.000	Rp3.722.000
2	Akses Fisik, Transportasi, dan Distribusi			
	a. Indeks Kesenjangan Harga (Price Disparity) Pusat vs Pinggiran Kota	5,20%	8,45%	13,10%
	b. Kontribusi Sektor Transportasi terhadap Inflasi Kota (Kota Banda Aceh)	1,12%	2,40%	4,15%
3	Stabilisasi Harga & Keterjangkauan			
	a. Jumlah Anggaran Intervensi Pasar / Pasar Murah Daerah (Rp)	450 Juta	400 Juta	320 Juta
	b. Total Komoditas Beras Subsidi yang Disalurkan via GPM/Opas (Ton)	120 Ton	95 Ton	65 Ton

Sumber: Hasil Observasi Pasar dan Data Kompilasi Diskoperindag Kota Banda Aceh, 2026

Tabel tersebut menunjukkan penurunan signifikan pada kualitas indikator kinerja dimensi akses (*accessibility*) pangan di Kota Banda Aceh sepanjang tahun 2023 hingga 2025 yang dipicu oleh tekanan inflasi berat. Dari sisi akses ekonomi, pelemahan daya beli masyarakat terlihat jelas dari kenaikan Garis Kemiskinan yang menyentuh Rp718.450/kapita/bulan pada tahun 2025 serta lonjakan rata-rata proporsi pengeluaran pangan rumah tangga desil 1–2 hingga mencapai 66,80%, yang menandakan makin besarnya porsi pendapatan warga miskin yang tersedot hanya untuk memenuhi kebutuhan makan di tengah pertumbuhan Upah Minimum Kota (UMK) yang melambat. Kondisi ini diperparah oleh memburuknya akses fisik dan distribusi, yang tercermin dari meroketnya indeks kesenjangan harga (*price disparity*) antara pusat dan pinggiran kota dari 5,20% menjadi 13,10% akibat membengkaknya kontribusi sektor transportasi terhadap inflasi hingga mencapai 4,15% pada tahun 2025. Sayangnya, di tengah penurunan daya beli dan gangguan distribusi tersebut, kinerja stabilisasi harga oleh pemerintah daerah justru mengalami kemunduran struktural; hal ini dibuktikan oleh pemangkasan anggaran intervensi pasar murah yang menyusut menjadi Rp320 juta serta penurunan drastis volume penyaluran komoditas beras subsidi yang merosot hingga menyisakan 65 ton pada tahun 2025, sehingga memperluas kerentanan akses pangan bagi masyarakat perkotaan.

3.3. Pemanfaatan (Utilization)

Dimensi pemanfaatan pangan berkaitan erat dengan asupan gizi, keragaman jenis makanan yang dikonsumsi, serta bagaimana tubuh menyerap nutrisi tersebut demi keberlangsungan hidup yang sehat. Dampak langsung dari melemahnya akses ekonomi akibat inflasi adalah rusaknya kualitas pemanfaatan pangan ini. Untuk mensiasati keterbatasan anggaran belanja, konsumen rumah tangga terpaksa mengadopsi mekanisme bertahan (*coping mechanism*) yang mengorbankan kualitas nutrisi demi mempertahankan kuantitas atau rasa kenyang sekadarnya.

Tabel 3.
Perkembangan Indikator Kinerja Dimensi Pemanfaatan (*Utilization*) Pangan di Kota Banda Aceh Tahun 2023–2025

No	Indikator Pemanfaatan (Utilization) Pangan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
1	Kualitas Konsumsi Pangan & Gizi			
	a. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Kota Banda Aceh	86,40	83,15	78,50
	b. Prevalensi Balita Gizi Kurang (Underweight) (%)	4,10%	4,80%	6,95%
	c. Persentase Konsumsi Energi dari Kelompok Padi-Padian & Instan (%)	51,20%	54,60%	62,80%
2	Edukasi Pola Konsumsi & Ketahanan Rumah Tangga			
	a. Jumlah Penyuluhan Konsumsi B2SA oleh Dinas Teknis (Kali/Tahun)	18 Kali	12 Kali	6 Kali
	b. Proporsi Program TPID untuk Sektor Edukasi/Pemanfaatan Pangan	0,00%	0,00%	0,00%

Masyarakat mulai mengalihkan pola konsumsinya dengan mengganti bahan pangan segar yang padat gizi (seperti daging ayam ras, ikan segar, dan sayuran bervariasi) ke komoditas olahan murah yang sarat akan karbohidrat tetapi minim gizi mikro (seperti mi instan atau makanan instan lainnya).

Pergeseran perilaku konsumsi ini secara tidak langsung menurunkan skor Indeks Pola Pangan Harapan (PPH) dan menurunkan derajat keragaman konsumsi pangan berkualitas di Kota Banda Aceh, yang jika dibiarkan dalam jangka panjang berisiko memicu peningkatan angka malnutrisi terselubung (*hidden hunger*) di wilayah perkotaan.

3.4. Stabilitas (Stability)

Dimensi stabilitas memantau kesinambungan akses, ketersediaan, dan pemanfaatan pangan sepanjang waktu, baik dalam kondisi normal maupun saat terjadi krisis musiman seperti hari besar keagamaan atau anomali cuaca. Di Kota Banda Aceh, stabilitas pangan berada dalam kondisi yang sangat rentan sepanjang tahun. Fluktuasi harga tidak menunjukkan pola landai yang dapat diprediksi, melainkan pola grafik tajam yang naik-turun secara drastis mengikuti kalender pasokan daerah produsen eksternal dan hari besar keagamaan seperti meugang, bulan Ramadhan, dan menjelang Hari Raya Idul Fitri.

Tabel 4.
Analisis Kerentanan Stabilitas Pangan Berdasarkan Siklus Bulanan

Siklus Waktu / Musim	Dampak Terhadap Pasokan	Respon Harga Pasar	Tingkat Stabilitas
Musim Penghujan / Barat	Truk logistik tertahan di perbatasan darat akibat longsor atau badai laut.	Lonjakan harga komoditas segar (cabai dan sayur) naik 40-60%.	Instabil (Sangat Rendah)
Hari Raya / Meugang	Permintaan daging sapi dan ayam ras meningkat tajam secara serentak.	Harga daging melonjak tinggi, stok menipis dalam waktu singkat.	Krisis Musiman Jangka Pendek
Musim Panen Raya Daerah Produsen	Pasokan dari Aceh Besar dan Pidie melimpah masuk ke pasar kota.	Harga bergerak turun ke titik normal terendah, stok melimpah.	Stabil (Tinggi)

Sumber: Hasil Olahan Analisis Data Primer Peneliti, 2026

Tabel 4 menunjukkan bahwa dimensi stabilitas merupakan titik paling kritis dalam sistem ketahanan pangan lokal. Ketidakmampuan pemerintah daerah dalam mengontrol kestabilan harga sepanjang waktu membuat hak atas pangan bagi masyarakat rentan selalu berada dalam bayang-bayang ketidakpastian ekonomi pasar.

3.4. Diskusi Temuan Utama Penelitian

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi inflasi pangan di Kota Banda Aceh sangat rentan karena tingginya ketergantungan pasokan eksternal yang mencapai 90 persen, rantai distribusi yang panjang melibatkan 5-6 lapis perantara, serta infrastruktur pendukung yang tidak memadai. Kondisi ini berdampak signifikan terhadap ketahanan pangan masyarakat, khususnya kelompok miskin perkotaan yang mengalokasikan 60-70 persen pendapatannya untuk pangan. Sama halnya dengan temuan (Simatupang, 2018) yang mengkritisi bahwa kebijakan pangan nasional selama ini masih berorientasi pada swasembada beras, sehingga mengabaikan dimensi aksesibilitas dan stabilitas harga yang justru menentukan kesejahteraan masyarakat. Temuan penelitian ini memperkuat argumen Simatupang bahwa ketahanan pangan tidak cukup hanya diukur dari ketersediaan stok secara agregat, tetapi harus mempertimbangkan akses ekonomi rumah tangga terhadap pangan, terutama di wilayah perkotaan yang memiliki kerentanan struktural akibat minimnya lahan pertanian produktif.

Selanjutnya, temuan penelitian ini sejalan dengan pandangan Suryana (2022) yang menyoroti bahwa tantangan besar ketahanan pangan Indonesia meliputi ketergantungan impor, degradasi sumber daya, dan lemahnya koordinasi antarlembaga. Dalam konteks Kota Banda Aceh, ketergantungan pasokan eksternal yang ekstrem (90 persen) merupakan bentuk mikro dari ketergantungan impor yang dihadapi Indonesia secara nasional. Suryana menegaskan pentingnya sinergi antara kebijakan pusat dan daerah serta strategi adaptif yang mempertimbangkan perubahan iklim dan dinamika pasar. Temuan penelitian ini memperkuat pernyataan Suryana dengan menunjukkan bahwa koordinasi antara Pemerintah Kota Banda Aceh dengan daerah pemasok seperti Kabupaten Aceh Besar, Pidie, dan Sumatera Utara masih lemah dan terhambat oleh ego sektoral serta perbedaan kebijakan antar daerah. Bahkan, ketika terjadi gagal panen di daerah produsen, harga di Banda Aceh langsung terpengaruh dalam 1-2 hari, yang mengindikasikan tidak adanya mekanisme pengamanan pasokan yang memadai.

Penelitian ini juga menemukan bahwa dimensi pemanfaatan (*utilization*) dalam Food Security Framework sering terabaikan dalam kebijakan pengendalian inflasi di Kota Banda Aceh. TPID masih fokus pada intervensi harga dan stok, sementara edukasi gizi dan pola konsumsi yang sehat belum menjadi program prioritas. Kondisi ini menyebabkan terjadinya negative nutrition transition, di mana masyarakat miskin terpaksa mengganti pangan bergizi tinggi dengan pangan karbohidrat sederhana atau mi instan saat terjadi inflasi. Berbeda dengan temuan (Clapp et al., 2022) yang mengusulkan kerangka enam dimensi ketahanan pangan dengan menambahkan aspek agency dan sustainability, penelitian ini justru menemukan bahwa di tingkat lokal, dimensi yang paling mendesak untuk diperkuat adalah pemanfaatan pangan (*utilization*) melalui edukasi gizi, karena dimensi ini sering diabaikan dalam kebijakan pengendalian inflasi yang masih bersifat reaktif dan berorientasi jangka pendek. Clapp et al. menekankan bahwa ketahanan pangan tidak hanya tentang ketersediaan dan akses pangan, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat dalam menentukan sistem pangan mereka. Temuan ini menolak sebagian kerangka Clapp dalam konteks Kota Banda Aceh, karena sebelum aspek agency dan sustainability dapat diwujudkan, pemenuhan dasar dimensi pemanfaatan melalui edukasi gizi dan pencegahan negative nutrition transition harus menjadi prioritas utama mengingat tingginya kerentanan masyarakat miskin perkotaan terhadap inflasi pangan.

Temuan penting lainnya adalah terkait kendala regulasi teknis provinsi yang menghambat distribusi Cadangan Pangan Pemerintah (CPP). Penelitian ini menemukan bahwa meskipun stok beras di Bulog melimpah (puluhan ribu ton), Peraturan Gubernur tentang CPP yang belum selesai sepanjang tahun 2024 menyebabkan cadangan pangan tidak dapat didistribusikan saat terjadi lonjakan harga atau bencana alam. Hal ini berbeda dengan temuan Hariyono (2025) yang menyoroti pentingnya ketahanan pangan berbasis kinerja daerah, namun tidak secara spesifik membahas hambatan regulasi teknis antar tingkat pemerintahan. Temuan penelitian ini memperkaya kajian Hariyono dengan menunjukkan bahwa efektivitas cadangan pangan pemerintah sangat bergantung pada tata kelola regulasi yang terintegrasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Tanpa adanya Peraturan Gubernur yang mengatur mekanisme distribusi CPP secara jelas, stok yang melimpah di gudang hanya akan menjadi angka tanpa manfaat nyata bagi masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Banda Aceh saat banjir akhir tahun 2025 yang membutuhkan waktu 3 hari untuk mengeluarkan izin distribusi CPP.

Selanjutnya, temuan penelitian ini mengidentifikasi bahwa panjangnya rantai distribusi pangan di Banda Aceh (5-6 lapis perantara) menyebabkan mark-up harga mencapai 30-40 persen dari tingkat produsen ke konsumen, bahkan untuk komoditas cabai bisa mencapai 100-200 persen. Temuan ini sejalan dengan penelitian Mewa et al. (2022) yang mengidentifikasi bahwa kelemahan dimensi konsumsi dan keamanan pangan di Indonesia masih menjadi tantangan utama. Mewa dkk merekomendasikan penguatan infrastruktur dasar seperti jalan, kesehatan, dan pendidikan, khususnya di wilayah Indonesia bagian Timur. Temuan penelitian ini memperkuat rekomendasi tersebut dengan menunjukkan secara konkret bahwa kerusakan jalan di kecamatan pinggiran seperti Kuta Baro dan Meuraxa menyebabkan kesenjangan harga 10-15 persen lebih tinggi dibandingkan pusat kota, sehingga menciptakan ketidakadilan spasial dalam akses pangan. Masyarakat pinggiran yang berpenghasilan lebih rendah justru menghadapi harga pangan lebih mahal, yang merupakan bentuk ketidakadilan struktural dalam sistem pangan perkotaan.

Temuan mengenai program urban farming dan Gerakan Menanam yang diinisiasi melalui Surat Edaran Wali Kota Banda Aceh Nomor: 520/0901/SE/2025 menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah berupaya mengurangi ketergantungan pasokan eksternal melalui pemanfaatan pekarangan. Namun, efektivitas program ini masih terbatas pada skala rumah tangga dan belum cukup menggantikan pasokan pasar. Hal ini berbeda dengan temuan (Salasa, 2020) yang menekankan bahwa strategi ketahanan pangan Indonesia harus mencakup dimensi ketersediaan, akses, dan keterjangkauan secara seimbang. Penelitian ini menemukan bahwa program urban farming di Banda Aceh belum terintegrasi dengan kebijakan pengendalian inflasi secara sistemik, karena program ini lebih bersifat sosialisasi dan edukasi daripada intervensi pasokan skala kota. Dengan demikian, penelitian ini menolak asumsi bahwa urban farming dapat menjadi solusi utama ketahanan pangan perkotaan dalam jangka pendek, karena keterbatasan lahan dan skala produksi membuatnya belum mampu mengurangi ketergantungan pasokan eksternal secara signifikan.

Penelitian ini juga menemukan bahwa sistem informasi pangan E-Haba Pangan yang dikembangkan oleh Dinas Pangan, Pertanian, Kelautan, dan Perikanan (DP2KP) masih memiliki kelemahan signifikan, terutama dari sisi ketidakakuratan data yang tidak real-time dan cakupan pasar yang terbatas hanya dua lokasi. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sufi et al., 2025) yang mengungkapkan bahwa tata kelola ketahanan pangan perkotaan di Indonesia masih menghadapi tiga tantangan utama: fragmentasi kelembagaan (*institutional fragmentation*), mekanisme koordinasi yang terbatas, serta ketidakseimbangan kekuasaan (*power asymmetry*). Temuan penelitian ini memperkuat argumen Sufi et al. dengan menunjukkan bahwa fragmentasi kelembagaan tercermin dari tidak terintegrasinya sistem informasi pangan antar dinas (DP2KP, Dinas Perdagangan, Bulog, dan BMKG), sehingga data stok dan harga tidak dapat dimanfaatkan sebagai sistem peringatan dini (*early warning*

system) yang efektif. Akibatnya, keputusan cepat seperti operasi pasar dadakan seringkali terlambat karena jeda waktu pelaporan 1-2 hari.

Lebih lanjut, penelitian ini mengidentifikasi kendala kelembagaan berupa ego sektoral antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menghambat efektivitas TPID. Misalnya, ketika harga cabai naik, Dinas Perdagangan ingin segera menggelar operasi pasar murah, tetapi Dinas Pertanian lebih fokus pada program peningkatan produksi jangka panjang, sementara Dinas Perhubungan lambat memberikan izin kendaraan logistik. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sunarto et al., 2024) yang menyatakan bahwa keterbatasan kewenangan TPID yang hanya bersifat koordinatif, tanpa kewenangan anggaran yang memadai, membuat banyak rekomendasi kebijakan tidak dapat diimplementasikan secara cepat dan tepat. Penelitian ini memperkuat temuan Sunarto et al. dengan menunjukkan bahwa ego sektoral tidak hanya terjadi antar OPD di tingkat kota, tetapi juga antar daerah (Banda Aceh dengan Aceh Besar), yang menyebabkan fragmentasi kebijakan antara wilayah produsen dan konsumen. Hal ini sesuai dengan analisis (Noor et al., 2025) dalam buku Merajut Pangan Bangsa bahwa persaingan kepentingan atas lahan serta tumpang tindih regulasi antar sektor (pertanian, perdagangan, dan tata ruang) merupakan kendala klasik dalam mewujudkan kedaulatan pangan di wilayah perkotaan.

Perbedaan signifikan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokus analisis yang menghubungkan secara langsung empat dimensi *Food Security Framework* (ketersediaan, akses, pemanfaatan, dan stabilitas) dengan kinerja kelembagaan TPID di tingkat kota. Penelitian-penelitian sebelumnya seperti (Simatupang, 2018), (Suryana, 2020), dan (Salasa, 2020) lebih bersifat makro dan nasional, sementara penelitian ini memberikan analisis mikro di tingkat kota dengan karakteristik spesifik sebagai wilayah konsumen dengan ketergantungan pasokan eksternal yang ekstrem. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian Mewa et al. (2022) yang menggunakan pendekatan kuantitatif berbasis indeks, karena penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus yang memungkinkan eksplorasi mendalam terhadap dinamika kelembagaan dan faktor-faktor kendala yang bersifat kontekstual.

Selain itu, penelitian ini menemukan bahwa faktor eksternal seperti cuaca buruk, kenaikan harga BBM, dan fluktuasi harga nasional memiliki dampak yang sangat dominan terhadap inflasi pangan di Banda Aceh karena ketergantungan pasokan eksternalnya. Temuan ini memperkuat penelitian (Ruel et al., 2017) yang menyatakan bahwa inflasi pangan bersifat pro-poor atau lebih berdampak pada masyarakat miskin karena proporsi pengeluaran untuk pangan pada rumah tangga miskin jauh lebih besar dibandingkan rumah tangga kaya. Penelitian ini menunjukkan secara empiris bahwa ketika harga pangan naik 10 persen, rumah tangga miskin di Banda Aceh harus mengalokasikan tambahan 6-7 persen dari total pendapatannya hanya untuk memenuhi kebutuhan pangan dasar, yang pada akhirnya memaksa mereka mengurangi kuantitas dan kualitas konsumsi. Hal ini sesuai dengan temuan (Headey & Hirvonen, 2022) yang menyatakan bahwa inflasi pangan merupakan masalah kebijakan publik utama yang mengancam ketahanan pangan perkotaan dengan menggerus daya beli masyarakat miskin.

Temuan penelitian ini juga menunjukkan bahwa pelaksanaan operasi pasar murah oleh TPID, meskipun rutin dilakukan setiap bulan, masih menghadapi kendala keterbatasan anggaran dan cakupan yang tidak menjangkau seluruh kecamatan. Hal ini berbeda dengan penelitian (Vetria, 2024) yang menyoroti optimalisasi peran TPID dalam pengendalian inflasi di Kota Palembang. Penelitian ini menemukan bahwa di Banda Aceh, operasi pasar murah seringkali bersifat reaktif dan terlambat karena tidak adanya sistem peringatan dini berbasis real-time, sehingga intervensi terjadi setelah harga mencapai puncaknya. Temuan ini memperkuat pentingnya pengembangan sistem informasi pangan yang terintegrasi dan real-time sebagai instrumen pengendalian inflasi yang efektif, sebagaimana yang direkomendasikan oleh (Morrow et al., 2025) bahwa sistem informasi pangan perkotaan yang ideal harus bersifat real-time dan terintegrasi untuk memungkinkan pengambilan keputusan yang cepat (*early warning*), bukan hanya sekadar dokumentasi data historis.

Kontribusi orisinal dari penelitian ini adalah pengembangan kerangka analisis integratif yang menghubungkan *Food Security Framework* dengan peran kelembagaan TPID dalam konteks kota dengan ketergantungan pasokan eksternal yang tinggi. Penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian inflasi pangan tidak hanya ditentukan oleh intervensi teknis (operasi pasar, subsidi harga), tetapi juga oleh tata kelola kelembagaan yang meliputi penguatan koordinasi antar OPD, penyelesaian regulasi teknis provinsi, pemberian kewenangan anggaran yang memadai kepada TPID, serta pengembangan sistem informasi pangan yang real-time dan terintegrasi. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kebijakan ketahanan pangan perkotaan yang lebih komprehensif dan kontekstual, serta menyajikan kerangka analisis yang dapat diadaptasi oleh kota-kota lain di Indonesia yang menghadapi tantangan serupa dalam menangani kerentanan pangan dan perubahan harga.

3.5. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Di samping temuan utama di atas, peneliti mengidentifikasi beberapa faktor determinan menarik lainnya yang secara signifikan bertindak sebagai pendorong sekaligus penghambat efektivitas kebijakan pengendalian inflasi di Kota Banda Aceh. Faktor pendukung utama bersumber dari tingginya modal sosial kelembagaan mikro di tingkat tapak, yaitu optimalisasi peran Kelompok Wanita Tani (KWT). KWT terbukti mampu menjadi benteng pertahanan terakhir pemenuhan pangan mandiri skala rumah tangga melalui pemanfaatan lahan pekarangan (*urban farming*). Keterlibatan aktif kaum perempuan berhasil mereduksi pengeluaran belanja bumbu dapur harian di tengah fluktuasi ekstrem harga cabai merah.

Sebaliknya, faktor penghambat operasional yang paling menonjol adalah terjadinya *time lag* data (jeda waktu pelaporan) pada sistem informasi ketahanan pangan daerah. Sistem pencatatan harga yang masih bersifat manual menghambat deteksi dini (*early warning system*) lonjakan harga oleh pengambil kebijakan. Selain itu, keterbatasan anggaran intervensi pasar murah daerah yang menyusut drastis menjadi Rp320 juta pada tahun 2025 menjadi bumerang bagi ruang gerak TPID, sehingga program operasi pasar murah kehilangan daya gempurnya dalam menstabilkan harga komoditas pokok secara berkelanjutan di seluruh penjuru kota.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, pembahasan, dan pembuktian empiris di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa kondisi inflasi pangan di Kota Banda Aceh berada pada tingkat kerentanan yang tinggi dengan puncak inflasi mencapai 6,10 persen pada Desember 2025. Fenomena ini berdampak langsung pada penurunan daya beli masyarakat ekonomi lemah, penurunan kualitas asupan gizi keluarga (Skor PPH turun menjadi 78,50), serta peningkatan angka balita gizi kurang hingga 6,95 persen. Upaya Pemerintah Kota Banda Aceh melalui instrumen operasi pasar murah, pemanfaatan pekarangan melalui Kelompok Wanita Tani (KWT), dan perintisan Kerjasama Antar Daerah (KAD) belum berjalan optimal. Kegagalan optimalisasi ini disebabkan oleh keberadaan kendala struktural-birokrasi, yang meliputi lambatnya pengesahan regulasi vertikal terkait Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) di tingkat provinsi, kuatnya fragmentasi ego sektoral (*silo thinking*) antar OPD di internal TPID, keterbatasan kewenangan anggaran taktis kelembagaan TPID, serta tingginya inefisiensi rantai distribusi logistik yang memicu disparitas harga antara pusat dan pinggiran kota.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama pada aspek cakupan spasial (lokus) yang hanya terfokus di wilayah administrasi Kota Banda Aceh sebagai model studi kasus, serta

keterbatasan alokasi waktu dan biaya operasional lapangan yang membuat pengamatan dinamika harga pasca-fluktuasi ekstrem tahun 2025 hanya dibatasi selama dua bulan penuh (Maret-April 2026).

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Peneliti menyarankan agar studi berikutnya dapat memperluas cakupan lokus penelitian secara komparatif lintas kabupaten/kota se-Provinsi Aceh, serta menerapkan pendekatan metode campuran (*mixed-methods*) untuk mengalkulasi dampak integrasi kebijakan KAD terhadap penurunan koefisien variasi harga pangan secara spasial.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang mendalam kepada Kepala Bagian Perekonomian dan SDA Setda Kota Banda Aceh beserta seluruh jajaran instansi kedinasan di lingkungan Pemerintah Kota Banda Aceh yang telah memberikan izin, memfasilitasi penelusuran dokumen teknis, dan bersedia menjadi informan kunci dalam riset ini. Apresiasi setinggi-tingginya juga ditujukan kepada para pedagang di Pasar Peunayong serta segenap warga Kota Banda Aceh yang telah meluangkan waktu dan memberikan data empiris yang sangat berharga demi merampungkan seluruh rangkaian laporan penelitian ini.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Abay, K. A., Breisinger, C., Glauber, J., Kurdi, S., Laborde, D., & Siddig, K. (2023). The Russia-Ukraine war: Implications for global and regional food security and potential policy responses. *Global Food Security*, *36*. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2023.100675

Chiera, I., Doe, J., Stoneham, M., Herrington, S., Devine, A., Humphreys, E., & Godrich, S. L. (2025). 'More prioritisation on food security' – exploring what initiative leaders envision for a food secure regional Australia. *Health and Place*, *95*. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2025.103543

Clapp, J., Moseley, W. G., Burlingame, B., & Termine, P. (2022). Viewpoint: The case for a six-dimensional food security framework. In *Food Policy* (Vol. 106). Elsevier Ltd. https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2021.102164

Marthalina, M. (2018). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENGENTASKAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN. *TRANSFORMASI: Jurnal Manajemen Pemerintahan*. https://doi.org/10.33701/jt.v10i1.403

Prabowo, H. (2019). Influence of Implementation of Development and Supervision Policy to the Effectiveness of Regional Autonomy in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*. https://doi.org/10.21787/jbp.11.2019.63-73

Ru, W., Zhang, L., Liu, D., Sun, N., Li, M., Faiz, M. A., Li, T., Cui, S., & Khan, M. I. (2024). New approach for regional water-energy-food nexus security assessment: Enhancing the random forest model with the aquila optimizer algorithm. *Agricultural Water Management*, *301*. https://doi.org/10.1016/j.agwat.2024.108946

Salasa, A. R. (2021). Paradigma dan Dimensi Strategi Ketahanan Pangan Indonesia. *Jejaring Administrasi Publik*, *13*(1). https://doi.org/10.20473/jap.v13i1.29357

Simatupang, P. (2018). *Analisis Kritis Terhadap Paradigma Dan Kerangka Dasar Kebijakan Ketahanan Pangan Nasional*. https://epublikasi.pertanian.go.id/berkala/fae/article/view/1113

Suryana, A. (2025). *Toward Sustainable Indonesian Food Security 2025: Challenges and Its Responses*. Global & Policy Journal of International Relations http://ejournal.upnjatim.ac.id/index.php/jgp/article/view/1918

Suryana, A. (2014). Menuju Ketahanan Pangan Indonesia Berkelanjutan 2025: Tantangan dan Penanganannya. *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, *32*(2). https://doi.org/10.21082/fae.v32n2.2014.123-135

Tono, Ariani, M., & Suryana, A. (2023). Kinerja Ketahanan Pangan Indonesia: Pembelajaran dari Penilaian dengan Kriteria Global dan Nasional. *Analisis Kebijakan Pertanian*, *21*(1). https://doi.org/10.21082/akp.v21i1.1-20

Wijatmoko, S., Akbar, B., Sartika, I., & Elsye, R. (2025). COLLABORATIVE GOVERNANCE IN DIGITAL TRANSFORMATION POLICY IMPLEMENTATION FOR MSMES IN JAKARTA: A SOCIO-LEGAL PERSPECTIVE. *Jurnal Hukum Unissula*, *41*(2). https://doi.org/10.26532/jh.v41i2.45941